

ABSTRAK

Peranan Golkar dalam bidang politik merupakan suatu hal yang menentukan. Peran Golkar dalam pemerintahan dan keterlibatannya dalam masyarakat sangat besar pengaruhnya. Masyarakat selalu mengalami kehidupan yang bersifat dinamis sehingga apabila Golkar kurang mau memperhatikan kualitas organisasi dan personalianya akan dapat berpengaruh terhadap perolehan suara pada setiap pemilu. Perubahan dan pembaharuan dalam bidang politik Golkar perlu suatu hal yang diperlukan sebab Golkar perlu selalu koreksi terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian Golkar mampu menyelaraskan diri terhadap segala bentuk perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang mengarah pada pembangunan. Golkar harus mampu untuk dapat sebagai penggerak dan pelopor dalam meningkatkan kualitas baik organisasi maupun personalianya bagi organisasi-organisasi yang lain dalam pelayanannya terhadap masyarakat.

Selama masa Orde Baru telah dijalankan pemilu sebanyak empat kali yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, dan 1987. Perkembangan Golkar di Kabupaten Klaten dapat diketahui melalui setiap pemilu. Bagaimana pelaksanaan kampanye dijalankan ? Bagaimana pelaksanaan pemungutan suaranya ? Bagaimana hasil akhirnya ? Bagaimana evaluasinya ?

Tampilnya Golkar dalam arena percaturan politik di Indonesia pada tahun 1964 merupakan jawaban langsung atas perkembangan politik ketika itu. Suasana ketidakstabilan politik dan semakin kuatnya pengaruh PKI yang mendorong lahirnya Sekretariat Bersama Golkar (SEKBERGOLKAR). Golkar dicoba untuk tampil pertama kalinya dalam Pemilu 1971 dalam suasana peralihan dari sistem multi partai kepada sistem kepartaian yang lebih sederhana menjadi 10 partai yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

didalamnya termasuk Golkar. Dalam pemilu ini Golkar muncul sebagai fenomena baru dalam sistem politik Indonesia.

Pemilu 1977 ini dapat dianggap sebagai tonggak dari tahap pemilu berikutnya. Sebelum pemilu dilaksanakan telah diadakan penyederhanaan kepartaian yang jumlahnya sepuluh menjadi tiga partai yaitu PPP, Golkar, PDI pada tahun 1973. Pada pemilu ini pertama kalinya setelah Orde Baru berhasil menelorkan undang-undang tentang partai politik dan Golkar (UU No. 3 tahun 1975) yang mewajibkan setiap organisasi kekuatan sosial politik berasaskan Pancasila dan UUD 1945, meskipun masih diperbolehkan pula menggunakan asas ciri masing-masing. Hasil akhir Golkar Kabupaten Klaten pada pemilu ini apabila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya mengalami penurunan jumlah suara, sehingga berpengaruh juga terhadap perolehan jumlah kursi di DPRD Klaten.

Pada Pemilu 1987 pelaksanaannya diatur oleh UU No. 3 tahun 1985. Ketentuan dari paket undang-undang itu menyatakan bahwa organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan berkewajiban menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya undang-undang tersebut maka sebuah organisasi politik tidak berhak lagi menjadi organisasi yang bersifat eksklusif, untuk ras, agama, dan suku tertentu. Pada masa sebelumnya berlaku ketentuan itu masih terlihat adanya organisasi politik yang bersifat eksklusif bagi pemeluk agama Islam, yaitu PPP.

Berdasarkan ketentuan UU No. 3 tahun 1985 ini pula maka sifat keanggotaan organisasi politik adalah terbuka dan perseorangan. Sifat terbuka orpol berarti keanggotaan parpol dan Golkar terbuka bagi setiap warga negara Indonesia yang sudah cukup umur untuk menjadi anggota tanpa membedakan ras, suku, agama dan sebagainya. Sedangkan sifat perseorangan keanggotaan orpol berarti tidak adanya ikatan atau hubungan organisatoris formal antara parpol dan Golkar dengan ormas-ormasnya yang menjadi *onderbouw* Golkar. Hasil Pemilu 1982 dan 1987 Golkar selalu meningkat, kemenangan Golkar sejak pemilu 1971 sampai 1987 selalu diraihinya walaupun suara nominal dan prosentasenya mengalami perubahan.